BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada beberapa bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, diantaranya:

1. Faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Kabupaten Karawang yakni: Faktor Agama, Faktor Ekonomi, dan Faktor Hamil diluar nikah (*Married by Accident*). Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi.
2. Dampak pemberian Dispensasi Nikah dalam aspek Yuridis dan Sosiologis adalah ketika seorang pasangan ingin melangsungkan pernikahan namun belum mencapai usia yang di tetapkan UU Perkawinan maka harus mendapat surat izin permohonan dispensasi nikah dari hakim untuk bisa mendaftarkan dirinya ke KUA. Selain itu, semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang ada, sehingga masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk mentaati aturan tersebut.
3. Hakim di Pengadilan Agama menjalankan tugas-tugasnya berpedoman pada UndangUndang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan peradilan hakim tidak terikat instansi atau lembaga apapun dan berhak mengeluarkan putusan sendiri tanpa tekanan pihak lain. Putusan hakim yang baik adalah putusan yang

memiliki tiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim menetapkan permohonan dispensasi nikah berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, juga Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Hakim mempertimbangkan dari segala aspek kehidupan sebelum memberikan putusan mengabulkan atau menolak perkara dispensasi, antara lain aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya suatu unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan dan aspek-aspek lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.

B. Saran

1. Bagi lingkungan Peradilan khususnya Hakim di dalam memberikan dispensasi kawin hendaknya lebih memperketat kembali dalam kaidah fiqhiyyah yang berbentuk Maqashid Al-Syari'ah juga perlu menanyakan kesiapan orang tua maupun anak yang hendak menikah demi tujuan mengurangi angka pernikahan usia di bawah umur di Indonesia umumnya dan wilayah Kabupaten Karawang khususnya.

Bagi Mahasiswa hukum keluarga yang mempunyai tugas sebagai agen perubahan dan bagian dari masyarakat, sebaiknya ikut berkontribusi secara langsung untuk memberikan pengajaran dan pembelajaran terkait pernikahan usia di bawah umur, regulasi permohonan dispensasi kawin dan bahaya pernikahan usia di bawah umur.